

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI SIMPEG  
PADA SKPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017**

---

**A. LATAR BELAKANG**

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **Gambaran Umum**

SIMPEG SKPD merupakan pengembangan dari SIMPEG BKD yang dibentuk dan disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut, terutama dipergunakan dalam pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM.

Program Aplikasi SIMPEG SKPD yang dimaksud dapat beroperasi dalam jaringan Online dengan sistem intranet maupun internet (*Web Based Application*), sehingga dapat digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terpisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi

data keseluruhan secara otomatis. Dengan demikian, dapat dihasilkan informasi yang akurat dan akuntabel dalam pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Program aplikasi ini nantinya akan dapat langsung berdampingan dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung e-Government lainnya. Salah satu pemanfaatan Aplikasi SIMPEG SKPD ini adalah dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu aspek dalam sistem pembinaan melalui pemberian *reward and punishment* yang diberikan berdasarkan pengukuran kinerja, sehingga dapat meningkatkan motivasi kinerja PNS. Pembayaran TPP ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot tertinggi 60%, dan perilaku kerja dengan bobot nilai tertinggi 40%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS, setiap PNS diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Aplikasi SIMPEG SKPD yang bersifat online dapat dimanfaatkan untuk memudahkan PNS menyusun SKP secara terpusat dan menghasilkan *database* SKP yang lengkap dan menyeluruh, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menghitung besaran TPP yang akan diberikan kepada masing-masing PNS.

Dari sisi perilaku kerja, bobot nilai perilaku kerja ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, yang didapatkan dari data absensi PNS. Untuk mendapatkan data absensi yang akurat, akuntabel dan obyektif, pada tahun 2016 telah dipasang alat absensi elektronik pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan 6 SKPD lainnya sebanyak 20 buah. Pada tahun 2017 diproyeksikan untuk menambah mesin absensi sehingga dapat meliputi seluruh gedung kantor induk SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengumpulkan data SKP dan data perilaku kerja PNS berupa absensi itu perlu dikembangkan sebuah aplikasi serta perlu adanya inventarisasi permasalahan serta kebutuhan guna mendukung hal tersebut melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan sosialisasi bagi pengelola kepegawaian di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengembangkanebuah mekanisme *updating* data dan perhitungan besaran TPP melalui pengembangan aplikasi yang dapat memanfaatkan data SKP online dan data absensi PNS elektronik sebagai sumber data.

### 2. Tujuan

- a. Terkumpulnya data SKP dari Aplikasi Penyusunan SKP secara online sehingga didapat data SKP seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dan menyeluruh.
- b. Terkumpulnya data absensi elektronik PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akurat, akuntabel dan obyektif.
- c. Terselenggaranya kelancaran penghitungan besaran TPP PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersumber baik dari Aplikasi SKP online dan data absensi elektronik.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Guna mengukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini akan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan sosialisasi dengan mengundang pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **D. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

## F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK		■				■						
2	Bimbingan Teknis							■					
3	Konsultasi/Koordinasi		■	■	■	■		■	■	■	■	■	
4	Belanja Pengembangan Aplikasi			■									

## G. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah adalah terciptanya sebuah mekanisme *updating* data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan dukungan pelaksanaan :

1. Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memanfaatkan data SKP online dan data absensi PNS elektronik sebagai sumber data dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
  - Identifikasi kebutuhan;
  - Penyusunan hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak;
  - Dukungan interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
  - Penerapan dan pemberlakuan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik;
  - Penentuan tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggungjawab masing-masing;
  - Penyediaan fasilitas terkait yang dibutuhkan selama kegiatan;
  - Penyusunan tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi;
2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan sosialisasi dengan mengundang para pengelola data kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana koordinasi dalam mencapai tujuan.
3. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke SKPD.

## H. ANGGARAN

Perkiraan kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

**Semarang, 29 Pebruari 2016**

**KEPALA BIDANG DOKLAHTA  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Drs. S. PUDJI TJAHYONO, M.Pd.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19601020 198603 1 015